Zine Reang #2
PERJAL

Ilustrasu: Dayat Art

Daftar Isi

ZINE REANG
EDITOR: Isma Swastiningrum // PENULIS: Ahonk Bae, Suryana Hafidin, Rahmat Tarigan, M. Hamdan // TATA LETAK: Agus Teriyana

Fans page: ZineReang
blog: ZineReang.blogspot.com
email: Zinereang@gmail.com

Jalan Terjal Perjal

oleh AHONK BAE

SEGELAS KOPI masih menemani sore ini, dengan beberapa batang rokok yang siap dihembuskan kenikmatannya. Sekilas teringat apa yang yang terjadi dengan realita dalam dunia perbukuan baik di dunia ataupun di Indonesia. Dilansir dari laman *Kompas.com* bahwa minat baca masyarakat Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara. Berada di atas Bostwana dan di bawah Thailand. Setengah terkejut, tetapi tidak terlalu dengan apa yang diberitakan oleh Kompas atau lembaga survei yang sejenis tersebut. Sebab di pojokan kota masih banyak mereka yang menjajakan buku secara gratis kepada masyarakat. Sehingga pemberitaan tersebut hanya bisa dijadikan sebuah acuan untuk lebih giat dalam upaya mendekatkan bacaan kepada masyarakat.

Jika berkaca pada masa lalu atau di pengujung tahun 2009 terdapat sejumlah pelarangan buku yang, lagi-lagi ini dilalukan oleh junta (dewan pemerintah), atau lebih spesifiknya oleh Kejaksaan Agung. Buku yang dianggap 'kiri' menjadi fokus utama dalam pelarangan tersebut dengan menggunakan legitimasi hukum Undang-Undang Nomor 4/PNPS Tahun 1963 (UU No. 4/PNPS/1963) mengenai barang cetakan yang isinya mengganggu ketertiban umum. Lalu dengan UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan pasal 30, hingga pasal-pasal penyebar kebencian *hatzaai artikelen* atau yang lebih sering di kenal dengan kata *hoax*. Semenjak itu, atau bahkan jauh sebelum itu juga masih terdapat banyak pemberedelan-pemberedelan yang dilakukan Akan tetapi kami hanya mengambil sampel dari apa sebuah kontradiktif yang terjadi. Di mana pihak yang katanya menganut paham demokratis, tetapi melakukan sebuah 'penyensoran' atau bahkan mencegah upaya demokratis itu sendiri.

Belakangan muncul beberapa komunitas yang semakin menguatkan upaya literasi yang kini semakin urgen. Komunitas perpustakaan jalanan (selanjutnya Perjal) telah berkontribusi besar dalam upaya mencerdaskan atau paling tidak membuka wawasan di masyarakat melalui buku yang dilapakkan secara cuma-cuma. Perjal hari ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga Perjal tidaklah di pandang sebagai aktivitas monoton yang hanya sekedar berkumpulnya anak-anak muda. Lebih dari itu Perjal bisa menjadi media berkumpulnya teman-teman muda kreatif yang ikut serta dalam berkontribusi untuk masyarakat banyak.

Dalam sebuah buku yang berjudul *Pelarangan Buku di Indonesia* yang di terbitkan oleh PR2Media disebutkan bahwa "kemajuan peradaban bangsa di mana pun di dunia ini tidak bisa menafikan satu instrumen pengetahuan penting bernama buku". Dengan kata lain bahwa buku adalah jendela dunia dapatlah dibenarkan. Maka apabila dalam sebuah bangsa tak memiliki animo dalam dunia perbukuan, setidaknya membaca, maka bisa dikatakan bangsa tersebut jauh dari peradaban. Oleh karenanya kerja

Perjalanan Balada Emperan dalam event Streat Art.

kreatif muda-mudi dalam mendekatkan buku pada masyarakat patutlah diapresiasi. Dengan upaya yang diawali dengan melakukan konsolidasi dengan kolega, serta dimudahkan dengan kemajuan teknologi (jejaring sosial). Biasanya pelaku Perjal melakukan penggalangan buku atau biasa disebut dengan donasi buku hingga setelah terakumulasi beberapa puluh judul buku kemudian dijajakan atau dengan istilah melapak. Melapak biasanya diadakan pada hari libur atau dalam *event-event* tertentu. Berbaris dengan penjaja makanan dan minuman di sekelilingnya.

Di Indramayu sendiri perjal sudah banyak menjamur, seperti Balada Emperan, Pustaka Bambu Runcing, Perpustakaan Alif, dan masih banyak lagi. Akses masyarakat untuk membaca bisa didapat dengan mudah, sebab dengan adanya Perjal yang biasanya diikut sertakan *performing art* seperti pembacaan puisi juga teater dapat menarik masyarakat sekitar. Kemudian eksistensi Perjal juga

> "Jika anda ingin mengetahui apa yang berlangsung di sebuah zaman, cari tahulah tentang apa yang terjadi dengan penulisnya".
>
> *The Way of Being Free*

setidaknya dapat membantu beberapa aspek vital yang memang dalam ini berkewajiban dalam menularkan wawasan pengetahuan pada masyarakat terhadap dinas-dinas terkait. Seperti dinas perpustakaan dan tenaga pengajar setempat. Lebih dari itu, kriteria buku yang mudah diakses atau mudah dimengerti sangatlah membantu masyarakat dalam meningkatkan animo membaca. Dalam konteks penulis, Ben Okri dalam *The Way of Being Free*-nya menulis, "jika anda ingin mengetahui apa yang berlangsung di sebuah zaman, cari tahulah tentang apa yang terjadi dengan penulisnya". Hal ini dapatlah ditelisik dengan apa yang terjadi pada penulis yang menggantungkan dirinya pada honor yang diberikan sebuah penerbit, sebuah tulisan, semacam koran atau percetakan seperti pada umumnya, yang memberikan upah minim dari apa yang mereka hasilkan. Sebab dalam membuat sebuah karya tulisan membutuhkan banyak bahan, terutama buku serta riset mendalam tentang apa yang sedang ditulisnya.

Banyak manfaat yang didapat dengan melapak. Selain menambah banyak teman, saling bertukar buku bacaan serta wawasan baru, serta menambah relasi bagi pelapaknya, juga mendapatkan apresiasi dari komunitas-komunitas yang sejalan. Dengannya mereka juga saling berdiskusi mengenai bacaan serta tema-tema aktual. Perjal Indramayu juga menjadi tempat bacaan alternatif bagi masyarakat yang kurang mendapat akses buku. Meskipun buku yang didominasi oleh buku-buku ringan semacam buku bercorak *how to*, tetapi buku yang bersifat teoritis juga tersaji dalam lapakan sehingga dapat di akses oleh semua umur. Di Indramayu sampai sejauh ini belum ada isu 'miring' dengan Perjal di Indramayu. Meskipun kritik dalam lisan serta tulisan yang tajam seringkali mendapatkan perlakukan yang kurang menyenangkan, yang masih kontradiktif dengan prinsip demokrasi itu sendiri.***

Buku & Nuklir: Bibliokas Dalam Sirkuit Sejarah

Oleh Nur Umar

Beberapa hal yang sedikit menggelikan terjadi belum lama ini, razia buku atau sweeping atas buku-buku yang dilakukan oleh beberapa orang berseragam, pada Rabu, 26 Desember 2018 yang mafhum kita asumsikan sebagai seorang yang 'gagah'. Dengan dalih yang cukup mengesankan, bahwa buku dianggap sebagai acaman atas stabilitas sebuah negara, seperti buku yang berbau Marxisme-Leninisme dan Mao-tsung atau lebih tepatnya adalah komunisme, maka tindakan selevel sweeping pun digalakan. Apa sebenarnya yang terjadi di negeri dengan eufora bahwa bangsanya ingin sejajar dengan bangsa lain di negara-negara maju. Lebih dari itu bahwa animo razia telah begitu menggebu dalam mengamankan buku-buku yang kiranya dapat 'merusak' generasi bangsa. Begitupula dengan undang-undang yang memfatwakan atas kecerdasan bangsa, terkesan kontradiktif dengan apa yang tejradi belakangan.

Kita tentunya mafhum atau paling tidak hati nurani kita berkata 'itu prosedur atasan'. Memang hal demikian bukan hanya terjadi pada era dimana sebuah bangsa didorong untuk maju dengan menggalang program literasi pada setiap lininya, sekali lagi meskipun terjadi kontradiksi, kita abaikan.

Kita flash back sebentar, bahwa pada UU No. 4/PNPS/1963 yang dulu dijadikan tendensi atas sebuah pelarangan buku di Indonesia telah menuai sukses besar. Meski pun UU Pers No. 40/1999 juga menjadi komparasi atas UU 63 Tersebut. Di pucuk tahun 2009, pelarangan buku pun terjadi, 5 buku dilarang beredar, dengan asumsi yang sama - berbahaya. Pertama, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto besutan John Rosa. Kedua, Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Socrates Sofyan Yoman. Ketiga, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senya Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M Dahlan. Keempat, Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan. Kelima, Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad. Dari kelima buku tersebut, entah apa yang dipikirkan oleh mereka sebagai eksekutor sweeping atau dalang dari hal itu. Yang jelas bahwa kemajuan peradaban sebuah bangsa di manapun di dunia ini tidak bisa menafikan satu instrumen pengetahuan penting bernama buku.

Kemudian di Indonesia, pada masa Orde Baru juga menerapkan kontrol atas pers yang point of view-nya meliputi lima hal; 1. Kontrol kolektif dan preventif terhadap kepemilikan institusi media. 2. Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional seperti wartawan atau penulis melalui mekanisme dan reguilasi yang ketat. 3. Kontrol terhadap produk teks yang diciptakan, baik pemberitaan ataupun buku. 4. Kontrol terhadap sumber daya, seperti halnya monopoli kertas oleh penguasa. 5. Kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu yang tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.

Tidak kalah menariknya pada masa lalu, juga terdapat bibliokas, seseorang atau kelompok yang berhasrat menghancurkan buku dalam skala kecil atau besar. Seperti penghancuran buku yang terjadi di Sumeria sekitar 5.300 tahun lampau, yang disebabkan oleh perang yang berujung pada pembakaran. Seperti halnya perpustakaan yang tak luput dari kobaran api, mengingat bahwa perpustakaan adalah sebuah kuil ingatan dari sebuah bangsa. Kemudian dalam Romawi kuno terdapat istilah damnatio memoriae yaitu penjatuhan hukuman atas ingatan yang digolongkan tercela atau mengganggu stabilitas kerajaan. Meski pun juga terdapat genizah atau tempat menyembunyikan, dan biasanya kata ini digunakan untuk menyimpan ingatan pada masa lalu oleh orang-orang Roma pada masa lalu.

Penghancuran buku mafhum terjadi, baik buku-buku milik umum atau pribadi, dan penghancuran tersebut tentunya melalui beberapa fase melankolik seperti; pembatasan, peminggiran, penyensoran, penjarahan, dan yang berujung pada pembakaran. Namun hal demikian tidaklah tidak mungkin, apabila fenomena ini dibenturkan dengan sebuah kepentingan – politis misalnya. Fenomena ini juga dikenal sebagai akulturasi ataupun transkulturasi, saat sebuah kebudayaan memaksakan dirinya pada kebudayaan lain dengan cara mencangkokkan ingatan-ingatan baru pada masyarakatnya. Dinukil dari Umberto Eco, bahwa terdapat tiga bentuk penghancuran buku di dunia ini. Pertama, biblioklas fundamentalis, yaitu mereka yang tidak membenci buku sebagai objek, mereka takut akan isinya dan tidak ingin orang lain membacanya. Kedua, bibliosida sebab keabadian yaitu buku yang tidak dirawat dan membiarkan buku rusak begitu saja tanpa ada yang menyentuhnya, hal ini pernah terjadi di Italia. Ketiga, bibliosida sebab kepentingan, yaitu dengan merusak buku-buku untuk menjualnya per-lembar atau perpotong dengan tujuan laba yang lebih besar.

"Mungkin buku bukan dianggap sebagai media pencerdasan kehidupan bangsa, melainkan sebagai elemen potensial yang mengganggu ketertiban umum".

Dengan berpijak dari kata bahaya, yang dalam term didefinisikan sebagai sesuatu yang (mungkin) mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian). Maka kita tarik kesimpulan sementara bahwa buku yang dianggap berbahaya maka sama halnya dengan nuklir yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia sebab dampaknya. Sehingga dalam membendung upaya pembuatan nuklir beredar di tempat lain maka dilakukan upaya denuklirisasi dengan jalan diplomatis antar negara yang memiliki kepentingan. Pun dengan buku yang selama ini kerap kali disweeping dengan sebab yang setara. Isu komunisme begitu erat kaitannya dengan sweeping yang dilakukan oleh bibliokas dengan dalih-dalih yang sama. Dan tak syak lagi penulisnya pun tidak hanya mendapatkan stigma semata, lebih dari itu para penulis sejarah yang tak sejalan dengan ideologi pemerintah dipenjara atau bahkan dideportasi.

Menjadi sesuatu yang janggal saat membicarakan kebebasan berekesperasi namun di dalamnya terdapat 'sensor', meskipun dalam medium penunjang kemajuan sebuah bangsa. Kemajuan sebuah peradaban tanpa ditunjang oleh sebuiah bacaarr adalah hampa. Dan menurut Dimam Abror, ketidaksepakatan seseorang terhadap sebuah buku semestinya dilawan dengan menuliskan buku tandingan.

Memorabilia

oleh SURYANA HAFIDIN

SEORANG ANAK kecil berteriak dari dalam angkutan kota, aku yang duduk di depan sontak menengok ke belakang. "*Ya Allah gusti, getih!*" Darah! Darah memenuhi wajah salah satu dari anak kecil itu. Pak sopir di sampingku tak kalah kagetnya, ia menekan pedal rem sekaligus. Sontak seluruh penumpang mendadak terdorong tubuhnya ke depan. Kulihat anak kecil yang duduk paling depan itu

menangis histeris, sementara anak yang satunya wajahnya penuh bercak darah dan bertanya-tanya pada ibunya, “Apakah seseorang ini teman saya bu?”

Tubuhnya yang kecil itu dipeluk ibunya masing-masing. Terlihat ibunya gemetar dan terus menutup mata. Bukan, darah ini bukan dari anak itu. Mataku awas mencari darimana asalnya darah itu. Ternyata dari laki-laki yang sudah tersungkur di bawah kakinya. Laki-laki yang baru saja naik sekitar lima belas menit yang lalu. Laki-laki yang naik dengan menggendong tas selempang yang terbuat dari karung beras dengan isi berbagai macam golok dan duduk di depan anak-anak beserta ibunya itu. Dan sekarang, salah satu dari goloknya tergenggam di tangan kanannya. Bercak darah memenuhi pelipis goloknya. Ternyata bapak tadi baru saja menggorok lehernya sendiri!

SEPERTI BIASA, sepulang kuliah aku memilih naik angkot bernomor seri 03 jurusan terminal kota, Terminal Kijang. Angkot berwarna kuning dengan sedikit warna biru di bagian bawah, warna yang membedakan dengan jurusan lainnya. Entah mengapa segala hal di kota ini bercorak kuning. Tidak hanya angkutan umumnya saja, bangunan-bangunan pemerintahannya, museumnya, sampai jembatan yang menjulang tinggi di antara tepian sungai yang mengalir di tengah kota pun dicat kuning. Aku tidak tahu, apakah hari depan nanti kemungkinan tempat ibadah dan sekolah-sekolah akan dicat kuning juga.

Kirik! Umpat supir kepada pengendara sepeda motor yang mendadak berbelok ke kanan tanpa menyalakan lampu *sign*. Pengendara yang kelihatannya masih anak-anak itu hanya menoleh tak acuh meneruskan jalannya.

“Goblog! Belok tiba-tiba tanpa sen. Bocah zaman sekarang, umur masih bau kencur saja sudah lagu-laguan naik sepeda motor.”

Aku cukup tertawa menanggapi umpatan supir. Suasana di dalam angkutan umum cukup lengang. Di bagian belakang, duduk seorang ibu muda, langsat, dan cantik. Di sampingnya melekat anak perempuannya yang berusia sekitar empat tahun. Tampak gaya ibunya cukup kekinian, ia mengenakan kaos tipis hitam rangkap jaket kulit

berbulu di lehernya dan berwarna cokelat dengan membiarkan resletingnya terbuka. Sehingga tampak sekali lekuk payudaranya yang menyumbul di antara kedua resleting jaketnya yang membuat pikiran saya menjadi picik. Rambutnya hitam bercorak pirang terikat rapi ke belakang sehingga tak acak-acakan ketika angin menghembus masuk dari lubang jendela. Kakinya menggapit sebotol air mineral yang barang sebentar diminta oleh anaknya.

Tidak lama, naik seorang perempuan lain yang tak jauh usianya dengan yang pertama. Ia mengangkat anak perempuannya untuk masuk lebih dulu, lalu diikuti dirinya sambil tangannya meraba-raba dinding angkutan umum yang sempit itu. Anak perempuannya berusia sekitar empat tahun juga. Penampilannya lebih sederhana, dengan baju lengan panjang dan kerudung merah menutupi rambutnya.

"Sudah berapa tahun anaknya?" cetus ibu yang sudah dari tadi berada di dalam angkot.

"Jalan lima tahun, kalau anak ibu?" balas ibu yang baru duduk di sampingnya itu.

"Anak saya sudah mau empat tahun, tahun ini masuk ke PAUD. Anak ibu sudah di PAUD mana?"

"Anak saya sudah sudah jago bernyanyi *Ibu Kita Kartini*, jadi tak perlu ke PAUD."

"Anak saya sudah jago *Indonesia Raya*, tetapi tetap mesti ke PAUD."

"Tidak hanya itu. Anak saya sudah jago berhitung, di rumah setiap malam selalu menghitung bintang dan kekosongan di rumah."

"Anak saya jago sempoa sejak usia tiga tahun. Bahkan, anak saya sudah jago membaca, tetapi tetap mesti ke PAUD."

"Jangankan membaca, anak saya sudah hafal pasal-pasal Undang-Undang perceraian, jadi tidak perlu ke PAUD."

Percakapan terus diisi dengan percakapan-percakapan tentang masa depan anak-anaknya. Aku tak begitu memperhatikan lebih jelasnya, dan lebih memilih melanjutkan membaca novel yang baru saja kupinjam dari teman kerja.

DI BAWAH pohon *kersem* berdiri seorang laki-laki mengayunkan tangan kirinya menghentikan angkot yang kunaiki. Di tangan kanannya tergantung tas yang

terbuat dari karung beras berisi bermacam-macam golok. Wajahnya sudah nampak keriput, lelah nampak sekali dari caranya masuk ke dalam angkot. Dari cermin yang terpasang di depan ia terlihat duduk berhadapan dengan kedua ibu-ibu dan anaknya. Angkot berjalan lambat di bawah matahari yang semakin mencapai puncak teriknya, debu jalanan membubus kemana-mana ditiup angin yang membuat mata sedikit perih.

"Teman anak-anak saya semuanya sudah masuk PAUD, jadi anak saya mesti masuk PAUD," suara ibu yang pertama lamat-lamat kembali terdengar di telingaku

"Sejak lahir anak saya sudah memiliki banyak teman, di mana-mana semua yang ada adalah teman bagi anak saya. Termasuk hakim dan jaksa adalah teman anak saya. Jadi tidak harus ke PAUD," jawab ibu-ibu yang di sebelahnya.

Seorang laki-laki tadi tampaknya tak memperhatikan tingkah laku kedua ibu-ibu yang berada di depannya itu. Ia melepaskan topi di kepalanya dan mengibas-ibaskan ke wajah. Keringat mengucur deras dari wajahnya.

"Anak saya ingin jadi Doktor, jadi harus ke PAUD."

"Anak saya hanya ingin memiliki bapak! Jadi tidak harus ke PAUD."

"Bapaknya kemana, Ibu?"

"Bajingan Bapaknya! Kabur!"

"Ibu sudah cerai?"

"Baru resmi dua bulan lalu."

"Kasihan sekali anaknya masih kecil."

"Anak saya tak perlu dikasihani."

Laki-laki itu gusar, mungkin risih mendengar keributan kecil di depannya. Kepalanya menggeleng-geleng, jarinya meremas-remas dan tiba-tiba ikut bicara,

"Kalian ini para orang tua yang tidak bisa saya sebut orang tua. Dasar monyet semua! Anak-anak mesti mencapai kemerdekaannya sendiri, biarkan mereka memilih masa depannya. Para orang tua tinggal memfasilitasi saja. Mau ke PAUD, mau langsung ke Taman Kanak-Kanak berikanlah kebebasan." Ia menurunkan nadanya dan menghadap pada anak perempuan yang ditinggal oleh bapaknya.

"Merdekalah kamu, Nak! Tak peduli kau memulai dari mana, sekolahlah kau setinggi-tingginya. Jangan kalah karena bapakmu, bapakmu itu bajingan! Bajingan seperti itu tidak pantas disebut bapak."

Suaranya melemah, air mata mengalir dari sudut matanya. Pipinya kini basah oleh air mata, lalu dengan tiba-tiba ia mengambil sebuah golok dari dalam tasnya. Ia mengelus-elus sarung goloknya itu sambil menangis tersedu-sedu. Mengelus, lalu memeluk, mengelus lagi, lalu memeluk lagi. Mengelus lalu dari dalam sebuah dompet ia mengambil selembar foto. Ia meratapinya dengan tangis dan kemudian melepaskan sarungnya secara perlahan-lahan dan "*prak*" jatuh sarung itu dari goloknya.

Tiba-tiba, ia menggorokkan pelipis goloknya yang tajam itu ke lehernya. Ah Darah muncrat kemana-mana, termasuk ke wajah salah satu anak di depannya. Anak dari ibu yang kekinian itu langsung berteriak histeris melihat tubuh lelaki itu jatuh perlahan-lahan ke dekat kakinya. Ibunya tak sengaja menjatuhkan air mineral yang sejak tadi terus diapit di antara kakinya yang kini gemetar. Ia memeluk anaknya. Sementara ibu yang di sampingnya menangis melihat wajah anaknya penuh darah dan dengan segera memerlukan wajahnya, tubuhnya. Angkot berhenti, aku dan supir segera turun memeriksa belakang. Seseorang sudah terkulai di lantai mobil dengan leher terus mengucurkan darah. Di tangan kiri laki-laki tersebut tergenggam foto lama yang sudah sedikit luntur warnanya. Terpampang jelas sosok tiga orang anak yang dipeluk laki-laki muda yang sangat mirip dengan wajah laki-laki yang menggorok lehernya itu.

Indramayu, 2018

BER(t)ANI KARENA BENAR

STOP KRIMINALISASI PETANI

Pembangunan dan HAM

oleh RAHMAT TARIGAN

BELUM LAGI permasalahan pembangunan yang lain selesai, kini, pembangunan-pembangunan yang lainnya bermunculan.

Kemudian, bilamana kita tengok dari segala sudut pandang yang lurus, bahwasanya pembangunan yang terjadi saat ini, didasari

dengan awal permasalahan politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2, adalah jelas asas dan tujuan yang dimaksud memiliki beberapa poin. Yaitu, kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, serta keselarasan.

Sebelum jauh kita berbicara perihal pembangunan, ada baiknya kita melihat ke belakang sebentar kasus-kasus konflik agraria serta kehidupan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani serta nelayan. Kita bisa ambil satu contoh yang ada, yaitu Desa Mekarsari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kabupaten Indramayu memiliki luas lahan pada tahun 2014 selebar 209.942 hektare dari mulai tanah kering dan tanah sawah (indramayukab.bps.go.id). Sementara itu belum ada data terbaru, dari Dinas Pertanian serta dari Badan Pertanahan Nasional.

Desa Mekarsari Kecamatan Patrol, kini sedang digaduhkan dengan adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Dua Indramayu, semula 3x330 Mw sekarang bertambah menjadi 2x1000 Mw untuk Pembangkit Jawa dan Bali (PJB) Region VIII. Masyarakat yang tergabung dalam aliansi Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (JATAYU) menolak dengan adanya pembangunan yang diprogramkan pemerintah—dalam hal ini presiden—untuk menerangi seluruh “Nusantara”. Dalam implementasinya di dalam pemerintahan sendiri tidak ada sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah hingga desa. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana relativitas yang ada untuk

menjalankan kebijakan tersebut terhadap masyarakat itu sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi. Di bidang politik, penguasa yang menjalankan perpolitikan tanpa mengindahkan semua peraturan serta hukum yang ada. Karena bagaimana pun juga pemerintah yang bergandengan dengan para politisi itu akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan terutama di lingkup pemerintahan Desa. ketidaksinkronisasian itu menjadi batal ketika ada negosiasi, kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tertulis dengan jelas kesepakatan yang dimaksud adalah hanya sebagian pihak, yaitu para pemilik modal, pemerntah, serta pemilik lahan. Yang nyatanya tanpa ada kesepakatan dari para buruh tani yang bekerja dengan pemilik lahan.

Kemudian kemanusiaan, hilang sudah ketika menyelesaikan dalam berbagai aspek kehidupan seringkali terjadi yang tidak berkeadilannya. Kemanfaatan dalam membangun harus didasari dengan rasa pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang sudah menjaminkan seluruh hidupnya menjadi buruh agar kemanfaatan dengan adanya penerangan seluruh nusantara, tetapi tidak juga mengabaikan jalan pangan mayoritas masyarakat Desa Mekarsari yang berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan nelayan. Di situ semakin tampak bahwa kesejahteraan, keberlanjutan, serta keselarasan menjadi abu. Luluh lantah seketika harapan rakyat kecil karena pemerintahan tidak mengindahkan Undang-Undang yang ada (UUD 1945).

Selanjutnya hal yang terjadi di Desa Mekarsari (sebelum kriminalisasi terjadi) dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur bahwa pembela lingkungan tidak bisa dijerat secara hukum baik perdata maupun pidana. Namun, dalam implementasinya, masih sangat lemah, karena belum dijabarkan secara teknis, sehingga masih banyak aktivis lingkungan yang dijerat hukum. Para pembela lingkungan mutlak mendapatkan proteksi dari negara, karena pekerjaan mereka yang sangat berisiko dan berbahaya, karena berhadapan dengan kekuatan besar yang bisa melibatkan jaringan

"Saya memang
tidak sekolah.
Tapi saya tahu kalau
Bendera Indonesia itu
Merahnya di atas,
Putihnya di bawah.
Saya difitnah"

-Sawin

"Reang kuh
masang bendera kuh
abange ning duwur
puti'e ning esor!"

-Sukma

politisi, pejabat, penegak hukum, militer, dan pebisnis. Lebih fatal lagi, masyarakat proletar pun menjadi objek kekerasannya, demi mempertahankan haknya sebagai warga setempat yang merasa terancam jalan pangannya. Seperti yang terjadi oleh tiga pejuang lingkungan hidup yang ada di Desa Mekarsari (dituduh memasang bendera terbalik).

Tugas dan peran dari para pembela lingkungan yang menyuarakan pihak atau kelompok yang tidak mampu bersuara (*the voiceless*) dan lingkungan hidup yang tidak mampu membela dirinya sendiri adalah pekerjaan yang mulia. Sehingga, harus di hargai dan diberikan perlindungan yang memadai. Pemerintah Indonesia harus memberikan prioritas dengan menyusun rencana aksi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak para pembela lingkungan hidup sebagai pelaksana dari deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pembela HAM (2000). Masih ingatkah?

HUKUM DAN HAM (RENTAN KEKERASAN)

Bilamana kita melihat isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian tugas manusia itu sendiri adalah mengelola dan memelihara alam semesta dengan

dianugerahi hak untuk menjamin keberadaan. Harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada dirinya, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun (tak terkecuali). Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain (*homo homoni lupus*).

Tertulis dengan jelas isi dalam undang-undang tersebut. Secara Praksis, bahwa dalam ruang kehidupan manusia dari berbagai atmosfernya seringkali didapati kekerasan oleh para pejuang lingkungan hidup (baik secara individu maupun lainnya). Hal ini menjadi kontradiksi yang sangat disayangkan. Pemerintah, dalam hal ini pejabat yang memiliki wewenang tertinggi dalam bidang Yuridisnya harus bertanggung jawab penuh untuk mencegah oknum-oknum yang tidak memiliki nurani dan hanya menggunakan naluri sesaat.

Lebih lanjut, isu rekonsiliasi dan menggunakan mekanisme Yudisial melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc, pentingnya mempertebal nilai-nilai kemanusiaan antara relasi pemerintah dan rakyat, termasuk juga menghadirkan keberanian pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, kondisi yang terjadi hari ini justru sebaliknya, pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) justru menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi gampang dan tidak paham terhadap makna penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebab justru melibatkan aktor-aktor pelaku dalam kabinet kerjanya untuk menduduki jabatan yang strategis dari provinsi hingga sekelas kabupaten. Penulis selaku masyarakat dalam masyarakat itu sendiri bahwasanya masyarakat pun selama ini tidak diam-diam saja.

Perlu keberanian serta integritas yang mantap agar masyarakat tidak bergejolak dari berbagai elemen. Ada beberapa

komponen yang memang harus kita sadari satu sama lain, agar tidak terjadinya kontradiksi berkepanjangan—penulis rasa semua pembaca di negeri ini ada yang memiliki kapabilitas lebih ketimbang penulis. Komnas HAM banyak melakukan kompromi dengan agenda-agenda yang jauh dari semangat akuntabilitas dan mandatnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tidak pernah ada evaluasi dan audit menyeluruh atas kinerja Komnas HAM dan komisioner-komisionernya yang tidak banyak memberikan kontribusi pada isu HAM yang ada di Indonesia. Kondisi seperti sangat disayangkan bila kita tengok pasal 333 bahwasanya tiap orang berhak untuk hidup dan tidak terampas hak-haknya. Alih-alih pembangunan yang kemudian berujung kekerasan, tidak adakah cara lain dengan mengajak seluruh masyarakat yang akan terkena dampaknya dengan musyawarah (jalan kompromi) dalam satu ruangan tanpa ada kasta kemudian makan bersama? Sesederhana itu dan kemungkinan pun tidak ada penolakan yang berujung kekerasan.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tiap daerah, meingkatnya obral janji pun kian terjadi. Apalagi obral janji izin-izin. Ketika izin pun di keluarkan, pembangunan akan berdiri, dan yang sering kita jumpai selalu dibarengi dengan kekerasan. Baik kekerasan secara formil maupun materil. Mungkinkah obral janji izin tersebut hanya untuk mengumpulkan modal agar kampanye pun terlancarkan?

Berapa jumlah perizinan perusahaan yang disahkan ketika menjelang Pilkada? angka tersebut cukup fantasi. Kemudian belum lagi "*fee*" untuk calon kepala daerah ketika memberikan izin tersebut oleh perusahaan. Tidak dapat dipungkiri dan tidak bisa kita menutup kemungkinan dengan kemungkinan lainnya. Pembangunan serta kekerasan kian banyak terjadi di tiap daerah, di situ pula Hak Asasi Manusia terabaikan. Perlu di ketahui, rakyat tidak diam-diam saja. Hingga pada saatnya sudah "kronis" kemungkinan rakyat akan mengambil jalannya sendiri.***

100000
100000
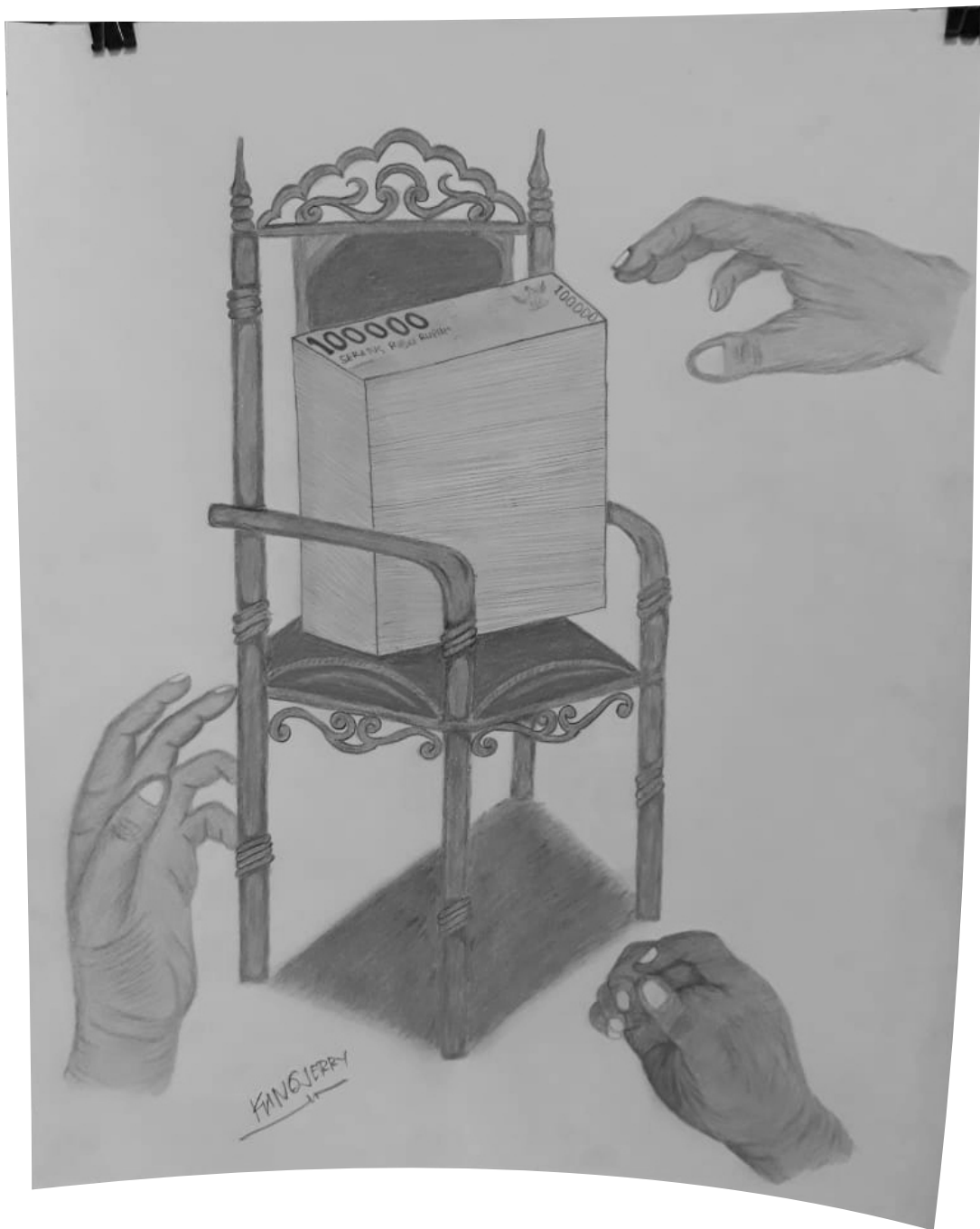
Buku Beri Aku Harapan

PUISI

oleh M. HAMDAN

Semesta melahirkanku dengan ketidaktahuan
Tanpa nama dan pengertian
Arti yang nantinya aku temukan
Dari setiap langkah kaki kehidupan

Pengertianku bukan aku yang temukan
Tapi penemuan orang lain yang kutemukan
Mungkin mereka juga hanya melanjutkan
Aku bingung bagaimana mencari pengertian
Pengertian tentang kenyataan-kenyataan

Kenyataan seringkali justru kepalsuan
Tipu daya kontruksi pikiran
Tontonan televisi yang menjadi tuntunan
Opini media masa sebagai pedoman

Aku buta akan kebenaran
Di dalam kebingungan aku mencari jalan
Sampai satu buku aku temukan
Ia ajarkan aku keberanian
Mencari jawaban pertanyaan

Aku baca lagi buku lain
Ia memberikan perbedaan
Buku memberiku pilihan wawasan
Melayang terbangi cakrawala pikiran

Satu buku beri aku satu jalan
Semakin banyak buku makin banyak jalan
Hingga ia memberiku harapan
Menemukan jalan kebenaran

Ilustrasi: Dayat-Art

"Untuk apa pembangunan megah kalo manusianya mati?."

Pak Ahmad (JATAYU)

Kami menerima setiap karya teman-teman kamerad baik berupa opini, esai, artwork, komik, puisi, cerpen atau yang lainnya, terutama kabar seputar Indramayu. Karya bisa di kirim melaui WA; 0896 0277 8729